

**ANALISIS KEUANGAN DAERAH UNTUK PENILAIAN KINERJA
KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
(PERIODE ANGGARAN 2014-2017)**

Nur Hidayat Wikantya¹, Rintan Nuzul Ainy, S.E. M.Sc.²

¹Universitas Ahmad Dahlan, ²Dosen Universitas Ahmad Dahlan

E-mail: ¹Dayat150001210@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menilai kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Purworejo, dilihat dari: 1) Rasio kemandirian, 2) Rasio efektivitas, 3) Tingkat keserasian belanja, 4) Rasio ketergantungan, dan 5) *Share & Growth* serta kemampuan keuangan Kabupaten Purworejo. Populasi dari penelitian ini adalah semua laporan APBD yang berasal dari Kabupaten Purworejo, sedangkan sampel dari penelitian ini adalah laporan APBD Kabupaten Purworejo dengan periode anggara 2014-2017 yang sudah diaudit. Metode pengambilan sampelnya adalah *purposive sampling*. Jenis penelitian ini adalah diskriptif kuantitatif. Data yang digunakan adalah data sekunder dengan metode pengumpulan data dokumenter. Hasil dari penelitian ini adalah: 1) Tingkat kemandirian Kabupaten Purworejo masih tergolong kurang mandiri. 2) Tingkat Ketergantungan Kabupaten Purworejo masih saangat tinggi. 3) Tingkat rasio efektivitas menggambarkan tingkat efektivitas pengelolaan anggaran pemerintah Kabupaten Purworejo tergolong sangat efektif. 4) Tingkat rasio keserasian belanja menggambarkan bahwa komitmen pemerintah Kabupaten Purworejo untuk membangun daerahnya kurang. Dan 5) Tingkat *share* dan *growth* dari PAD Purworejo menempatkan daerah tersebut dalam Kuadran II yang artinya kemampuan Perekonomian di Kabupaten Purworejo belum ideal.

Kata Kunci : Rasio kemandirian, rasio efektivitas, keserasian belanja, rasio ketergantungan, dan *share & growth*.

1. Latar Belakang

Untuk mengurangi sentralisasi pusat perekonomian yang hanya terpaku di Ibu Kota (untuk saat ini), serta mendorong pemerataan perekonomian sehingga mengurangi ketergantungan daerah terhadap pusat maka dimasa ini pemerintah melakukan adanya kebijakan otonomi daerah. Otonomi daerah dikamsutkan untuk pemerintah daerah agar membimbing daerahnya untuk mampu bersaing di dalam negeri maupun luar negeri (dalam hal ekonomi). Hal ini dapat diwujudkan oleh pemerintah daerah dengan cara mengembangkan potensi sumberdaya yang tersedia di daerah kekuasaannya. UU RI No. 23 tahun (2014) menjelaskan otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk mendukung terkait perencanaan dan pengendalian agar pelaksanaan pengoptimalan sumber daya daerah lebih terukur maka dibuatlah APBD. Dalam prosesnya pemerintah daerah akan memerlukan perencanaan dan tata kelola keuangan agar pelaksanaan dari kegiatan pengoptimalan sumberdaya dan kekayaan daerah lebih efektif dan efisien, maka pemerintah daerah perlu membuat anggaran daerah atau biasa disebut APBD.

Permendagri No.13 tahun (2006) menjelaskan APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Pemerintah daerah dituntut untuk mengelola atau mengolah sendiri kekayaan atau keuangan dan rumah tangganya, demi kebaikan dan kemakmuran masyarakatnya. Pentingnya APBD dikarenakan memuat semua aspek dari penganggaran hingga realisasi yang nantinya akan digunakan pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan rumah tangganya. Permendagri No. 13 tahun (2006) Pasal 4 Ayat 1 menjelaskan bahwa azas umum pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara tertib, taat pada aturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. APBD merupakan cerminan dari kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya. Dalam proses pembiayaan selama pemerintahannya baik untuk pelayanan masyarakat, pembangunan daerah, dan pengembangan sumberdaya daerahnya, semuanya tergambar dalam APBD. Dari pengelolaan keuangan daerah tentunya perlu dilakukan analisis dan penilaian terhadap pengelolaan keuangan daerah tersebut. Penilaian rasio keuangan dapat diterapkan untuk menilai pengelolaan keuangan dari segi nilai dan untuk analisis dapat dilakukan dengan

memberikan tolok ukur terhadap penilaian keuangan, tolok ukur itu akan memberikan gambaran mengenai kemandirian daerah dalam mengelola keuangannya dan menyelenggarakan otonominya secara efektif dan efisien

Untuk saat ini keadaan pemerintah daerah seperti yang dijelaskan oleh Muharomah (2017) menyatakan bahwa PAD Purworejo masih jauh dari taraf maksimal. Dikarenakan hanya menyumbang 13% dari total pendapatan daerah sebesar Rp 2,03 Triliun. Pendapatan dalam kebijakan umum anggaran dan plafon anggaran sementara (KUA PPAS) terlihat bahwa belanja tidak langsung menyerap anggaran hingga 58% dari total belanja daerah dengan alokasi 62% belanja pegawai dan belanja tidak langsung 36%. Bupati Purworejo Bastian (2018) menyatakan, angka kemiskinan pada Kabupaten Purworejo masih tergolong tinggi yakni mencapai 13,81% pada tahun 2017 meski pada tahun 2016 masih di atasnya yaitu sebesar 13,91%, atau turun sebesar 0,1% pada tahun 2017. Angka tersebut masih berada di atas angka kemiskinan di Jawa Tengah yaitu 13,27% dan nasional 10,12%, angka tersebut belum dapat memenuhi target 11,3%. Dari total 67,251 milyar atau 3,10% dari APBD hanya dapat menurunkan angka kemiskinan sebesar 0,1%, hal ini mengindikasikan bahwa program pemerintah tidak efektif. Bastian (2018) menyatakan bahwa di Purworejo juga terdapat 5 BUMD yang dimana hanya satu BUMD yang dinilai berkontribusi dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) yakni Bank Purworejo. Dari total Rp. 4,5 milyar modal dapat menghasilkan Rp. 45 juta perbulan hal ini dinilai bahwa kinerja Bank Purworejo lebih baik dibandingkan BUMD lain. Jika keuntungan apotik Rp. 10 juta perbulan dengan modal Rp 4,5 milyar, lebih baik uangnya kita masukkan ke Bank Purworejo, kita tinggal menunggu satu bulan untuk mendapat keuntungan Rp. 45 juta ujar dari Bupati Purworejo tersebut. Disisi lain dari isu-isu terkait pengelolaan yang kurang baik pemerintah daerah berencana mengambil kesempatan untuk membangun perekonomian didaerahnya karena adanya berita bahwa akan ada bandara internasional yang berdekatan dengan Kabupaten Purworejo. Dikutip dari Kompasiana (2014) yang menyatakan bahwa akan ada pembangunan bandara baru yang akan menggantikan bandara Adisutjipto yang akan di bangun di daerah pesisir selatan berdekatan dengan pabrik besi. Terkait komitmen pemerintah Kabupaten Purworejo untuk membangun daerahnya serta didukung dengan kondisi daerah dan kesempatan yang ada untuk membangun perekonomian daerahnya serta dari isu kinerja yang kurang baik, maka peneliti ingin menilai kinerja keuangan dari Pemerintah Kabupaten Purworejo.

Penelitian ini adalah penelitian yang terinspirasi dari beberapa jurnal atau penelitian terdahulu, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Pilat, dan Morasa (2017), yang tujuan dari penelitiannya adalah untuk menilai kinerja Pemerintah Kota Manado dengan tahun anggaran 2011-2015. Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu, dalam penelitian ini peneliti menggunakan rasio ketergantungan sebagai pengganti dari derajat desentralisasi dengan alasan bahwa peneliti ingin mengetahui seberapa besar Pemerintah Daerah Purworejo dalam menjalankan dan membiayai program kerjanya masih bergantung pada Pemerintah Pusat sedangkan derajat desentralisasi yang digunakan oleh peneliti terdahulu akan memberi gambaran mengenai seberapa besar kontribusi pendapatan asli daerah terhadap total dari pendapatan daerah yang didalamnya termasuk pendapatan pusat dan dana pinjaman serta dana/pendapatan lain-lain yang sah. Alasan kedua adalah terkait keterbatasan waktu dan pembatasan terkait tujuan penelitian maka peneliti tidak memasukkan rasio efisiensi dan indeks kemampuan keuangan (IKK) didalam variabel penelitian ini. Yang ketiga adalah peneliti menggunakan analisis *share and growth* dimana hasil dari analisis ini akan menunjukkan seberapa besar tingkat pertumbuhan nilai PAD pemerintah daerah dan seberapa besar nilai dari persebaran/share PAD terhadap pemenuhan dari program kerja pemerintah daerah (belanja daerah). Hasil dari *share and growth* juga nantinya akan memberi gambaran yang lebih luas yaitu dengan memadukannya melalui metode kuadran untuk menilai tingkat kemampuan keuangan daerah. Pada metode kuadran ini akan menunjukkan seberapa baik kinerja PAD karena dilihat dari hasil penelitian BAPPENA (2003), yang dilakukan Deddy yang menyatakan bahwa daerah yang memiliki sumberdaya yang tinggi belum tentu kinerja PAD nya baik, maka dari itu peneliti ingin melihat dari segi perkembangan sumberdaya dan kinerja PAD di kabupaten terkait apakah sudah baik atau belum. Penelitian ini, segi penilaian dan pengukurannya *share and growth* lebih jelas dan teratur.

Alasan peneliti memilih tahun 2014 hingga 2017 sebagai bahan penelitian adalah yang pertama terkait otonomi daerah yaitu berkaitan dengan pembangunan dan infrastruktur daerah yang menurut peneliti kurang baik sehingga memberi gambaran bahwa kinerja Pemerintah daerah kurang baik. Yang ke dua adalah berkaitan dengan keterangan Pemerintah bahwa BUMD yang dikelola pemerintah tidak berjalan dengan baik. Yang ketiga dengan adanya pembangunan bandara baru yang menjadi pendorong berkembangnya dan didorongnya kegiatan perekonomian di Kabupaten Purworejo, terutama pada bidang pariwisata dan budaya. Namun itu merupakan alasan umum sedangkan alasan khususnya adalah peneliti ingin menilai kinerja Pemerintah Daerah Purworejo pada periode Pemerintah Pusat yang sama. Dalam artian jika Komandan yang memerintah sama apakah kinerja mereka tetap baik atau tidak. Dari pemaparan tersebut peneliti bertujuan menganalisis anggaran untuk menilai kinerja pemerintah pada kabupaten purworejo, oleh karena itu peneliti memilih judul **“ANALISIS KEUANGAN DAERAH UNTUK PENILAIAN KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO (PERIODE ANGGARAN 2014-2017)”**.

2. Landasan Teori

UU RI No. 23 tahun (2004) menjelaskan otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk mendukung terkait perencanaan dan pengendalian agar pelaksanaan pengoptimalan sumber daya daerah lebih terukur maka dibuat lah APBD. Permendagri No.13 tahun (2006) menjelaskan APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Pemerintah daerah dituntut untuk mengelola atau mengolah sendiri kekayaan atau keuangan dan rumah tangganya, demi kebaikan dan kemakmuran masyarakatnya. Permendagri No. 13 tahun (2006) pasal 4 ayat 1 menjelaskan bahwa azas umum pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara tertib, taat pada aturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab

dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk rakyat. Maka dari pengertian dan azas terkait APBD dapat disimpulkan bahwa dari APBD mencerminkan terkait pengelolaan kekayaan daerah serta target yang dicapai, maka dapat dilakukan penilaian kinerja yang menggunakan objek berupa APBD.

Mardiasmo (2002) menyatakan bahwa penilaian kinerja merupakan bagian dari sistem pengendalian yang bertujuan untuk mengetahui tingkat efisiensi dan efektivitas organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Untuk melakukan penilain kinerja salah satunya dapat dilakukan dengan analisis rasio, menurut Prastowo (2011), analisis rasio merupakan perhitungan dan interpretasi rasio merupakan salah satu alat yang banyak dipakai untuk menganalisis laporan keuangan dan laporan arus kas. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: 1) rasio kemandirian, 2) rasio ketergantungan, 3) rasio efektivitas, 4) keserasian belanja, dan 5) *share & growth*.

3. Penilain, Pengukuran dan Devinisi Variabel

A. Kemandirian

Cara Menghitung Rasio Kemandirian

$$\frac{\text{PAD}}{\text{Pendapatan Transfer Pusat + Propinsi + Pinjaman}} \times 100\%$$

Sumber: Mahmudi, (2007:128).

Tabel 3.1. Skala untuk mengukur tingkat kemandirian

| Skala Interval Kemandirian | |
|----------------------------|---------------------------|
| Persentase PAD | Kemampuan Keuangan Daerah |
| 0,00 – 10,00 | Sangat Kurang |
| 10,01 – 20,00 | Kurang |
| 20,01 – 30,00 | Sedang |
| 30,01 – 40,00 | Cukup |
| 40,01 – 50,00 | Baik |
| >50,00 | Sangat Baik |

Sumber: Tim Litbang Depdagri-Fisipol UGM, 1991 dalam Wahab, Rofingatun, Kreuta (2017)

Rasio Kemandirian yaitu menggambarkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam proses membiayai sendiri kegiatan pemerintahannya baik itu untuk pembangunan, pengembangan sumberdaya, dan pelayanan masyarakat. Dengan menunjukkan perbandingan PAD dengan pendapatan dari luar (transfer pusat dan propinsi serta pinjaman).

B. Rasio Ketergantungan

Cara Menghitung Rasio Ketergantungan

$$\frac{\text{Pendapatan Transfer}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Sumber: Mahmudi, (2007:128).

Tabel 3.2. Skala untuk mengukur tingkat ketergantungan

| Skala Interval Ketergantungan | |
|---|--------------------------------|
| Persentase PAD | Ketergantungan Keuangan Daerah |
| 0,00 – 10,00 | Sangat Rendah |
| 10,01 – 20,00 | Rendah |
| 20,01 – 30,00 | Sedang |
| 30,01 – 40,00 | Cukup |
| 40,01 – 50,00 | Tinggi |
| >50,00 | Sangat Tinggi |
| Sumber: Tim Litbang Depdagri-Fisipol UGM, 1991 dalam Wahab, Rofingatun, Kreuta (2017) | |

Rasio Ketergantungan yaitu menggambarkan seberapa besar Pemerintah Daerah dalam pembiayaan kegiatan pemerintahannya masih bergantung pada dana dari Pemerintah Pusat. Artinya semakin tinggi rasi ketergantungan maka semakin tinggi juga ketergantungan pembiayaan daerah tersebut terhadap dana dari pemerintah pusat dan profinsi.

C. Rasio Efektivitas

Cara Menghitung Rasio Efektivitas

$$\frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Sumber: Mahmudi, (2007:129).

Tabel 3.3. Skala untuk mengukur tingkat efektivitas

| Skala Interval Efektivitas | |
|--|---------------------|
| Persentase PAD | Tingkat Efektivitas |
| >100% | Sangat Efektif |
| 90% - 100% | Efektif |
| 80% - 90% | Cukup Efektif |
| 60% - 80% | Kurang Efektif |
| < 60% | Tidak Efektif |
| Sumber: Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327, 1996 dalam Wahab, Rofingatun, Kreuta (2017) | |

Rasio Efektivitas yaitu menggambarkan bagaimana pemerintah daerah dalam proses implementasi penerimaan daerah terhadap target perencanaanya secara riil. Sehingga akan didapat gambaran mengenai kemampuan pemerintah dalam dalam proses perencanaan dan realisasinya (tercapainya tujuan). Semakin tinggi rasio efektivitas maka semakin tinggi pula keefektivan pemerintah dalam merencanakan terkait pencapaian tujuan anggaran.

D. Kesorasian Belanja

Cara Menghitung Rasio Total Belanja Tidak Langsung

$$\frac{\text{Total Belanja Tidak Langsung}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Cara Menghitung Rasio Total Belanja Langsung

$$\frac{\text{Total Belanja Langsung}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Sumber: Mahmudi, (2007:151-152).

Rasio keserasian belanja yaitu akan menggambarkan keadaan dimana pemerintah akan menunjukkan seberapa besar komitmennya dalam memprioritaskan alokasi dananya untuk kemakmuran masyarakat dan pembangunan daerah.

E. *Share* dan *Growth*

Cara Menghitung *Share*

$$\frac{\text{PAD}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Sumber: Bappenas, (2003)

Cara Menghitung *Growth*

$$\frac{\text{PAD1-PAD0}}{\text{PAD0}} \times 100\%$$

Sumber: Mahmudi, (2007:125).

Rasio share yaitu akan menggambarkan seberapa besar kontribusi PAD dalam proses pemenuhan dan realisasi kerja pemerintah. Growth akan menunjukkan bagaimana perkembangan perekonomian asli daerah tersebut.

Tabel 3.5. Kondisi kemampuan daerah

| Kuadran | KONDISI |
|--------------------------------|---|
| I | Kondisi paling ideal. PAD mengambil peran besar dalam APBD dan daerah punya kemampuan mengembangkan Potensi lokal. Kondisi ini ditunjukkan dengan besarnya nilai Share disertai Growth yang tinggi. |
| II | Kondisi ini belum ideal, tapi daerah punya kemampuan mengembangkan potensi lokal sehingga PAD berpeluang memiliki peran besar dalam APBD. Sumbangan PAD terhadap APBD masih rendah namun pertumbuhan (Growth) PAD tinggi. |
| III | Kondisi ini belum ideal. Peran PAD yang besar dalam APBD punya peluang mengecil karena pertumbuhan PADnya kecil. Disini sumbangan PAD terhadap APBD tinggi, namun pertumbuhan PAD rendah. |
| IV | Kondisi ini paling buruk. PAD belum mengambil peran yang besar dalam APBD dan daerah belum punya kemampuan mengembangkan potensi lokal. Sumbangan PAD terhadap APBD rendah dan pertumbuhan PAD rendah. |
| Sumber: Deddyk (Bappenas 2003) | |

Gambar 3.1. Kriteria untuk menunjukkan kondisi kemampuan daerah

| | | |
|---|---|--|
| Rata-Rata Share (%) & Growth (%) | Kuadran II Share: Rendah Growth: Tinggi | Kuadran I Share: Tinggi Growth: Tinggi |
| | Kuadran IV Share: Rendah Growth: Rendah | Kuadran III Share: Tinggi Growth: Rendah |
| Sumber: Deddyk (Bappenas 2003) | | |

Analisis kuadran yang didasarkan pada nilai dari hasil perhitungan *share* dan *growth* nantinya akan menunjukkan terkait gambaran perekonomian di kabupaten tersebut, terkait apakah sudah idel atau belum.

4. Hasil Penelitian

A. Analisis Kemandirian

Tabel 4.1. Hasil penilaian tingkat kemandirian

| Tahun | PAD | Pendapatan Transfer | Rasio kemandirian | kriteria |
|------------------|-----------------|---------------------|-------------------|---------------|
| 2014 | 200.258.601.329 | 1.240.530.591.533 | 16.14% | Kurang |
| 2015 | 233.934.134.286 | 1.496.274.719.213 | 15.63% | Kurang |
| 2016 | 255.299.240.424 | 1.679.466.281.150 | 15.22% | kurang |
| 2017 | 298.606.494.653 | 1.707.599.922.714 | 17.49% | kurang |
| Rata-rata | | | 16.12% | Kurang |

Dari tabel 4.1 didapat kisaran nilai kemandirian Kabupaten Purworejo pada tahun anggaran 2014 sampai dengan 2017 berada diantara 15,22% sampai dengan 17,49% bahkan sempat mengalami penurunan kemandirian ditahun 2015 sebesar 0,51% menjadi 15,63%, dan ditahun 2016 menurun kembali sebesar 0,41% menjadi 15,22%, kemudian ditahun 2017 kembali meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 2,27% sehingga tingkat kemandirian Kabupaten Purworejo meningkat menjadi 17,49%, namun peningkatan kemandirian tersebut tidak merubah kriteria kemandirian Kabupaten Purworejo menjadi lebih baik. Artinya tingkat kemandirian Kabupaten Purworejo masih rendah (Kurang Mandiri). Hasil analisis ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Purworejo belum mampu mengelola sepenuhnya sumberdaya yang berada di Kabupaten Purworejo sehingga hasil dari output pengelolanya juga belum maksimal. Terlihat bahwa dalam proses penganggaran dan realisasinya Pemerintah Kabupaten Purworejo

untuk pengelolaan retribusi masih belum maksimal, hal ini ditunjukkan dengan nilai dari realisasi penerimaan retribusi daerah yang berkisar antara 71,41% hingga 110,54% dari tahun 2014 hingga tahun 2017 dengan rata-rata 90.16% yang. Retribusi daerah berperan dalam nilai PAD sehingga Pemerintah Kabupaten Purworejo seharusnya lebih memperhatikan hal-hal yang menjadi penyebab menurunnya realisasi retribusi sehingga dalam proses penganggaran dan realisasi ditahun setelahnya dapat mencapai target bahkan yang paling diharapkan adalah melebihi dari yang ditargetkan.

B. Rasio Ketergantungan

Tabel 4.2. Hasil penilaian tingkat ketergantungan

| Tahun | Pendapatan transfer | Total Pendapatan Daerah | Rasio ketergantungan | kriteria |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|----------------------|
| 2014 | 1.240.530.591.533 | 1.441.117.384.862 | 86.08% | Sangat tinggi |
| 2015 | 1.496.274.719.213 | 1.842.491.063.926 | 81.21% | Sangat tinggi |
| 2016 | 1.679.466.281.150 | 2.069.000.842.574 | 81.17% | Sangat tinggi |
| 2017 | 1.707.599.922.714 | 2.114.807.792.154 | 80.74% | Sangat tinggi |
| Rata-rata | | | 82.30% | Sangat tinggi |

Dari tabel 4.2 didapat nilai ketergantungan untuk tahun 2014 hingga 2017 yang berkisar antara 81.21% hingga 86,08% dan rata-rata antara tahun anggaran terkait (2014 hingga 2017) menunjukkan nilai 83,30% sehingga dapat dikatakan bahwa tingkat ketergantungan Kabupaten Purworejo sangat tinggi. Ditunjukkan pada tahun kedua (2015), ketergantungan Kabupaten Purworejo sempat menurun meski setelah itu meningkat kembali dan penurunnya tersebut tidak mengubah status ketergantungannya. Dapat dikatakan bahwa kesesuaian antara tingkat ketergantungan dan tingkat kemandirian keduanya menggambarkan bahwa Kabupaten

Purworejo dalam proses pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakatnya masih bergantung terhadap Pemerintah Pusat/Propinsi. Sebagian besar pembiayaan guna menjalankan program-program pemerinthannya sebagian besar masih didominasi dana yang berasal dari pemerintah pusat dibandingkan dengan dana yang berasal dari pendapatannya sendiri. Sebaiknya pemerintah Kabupaten Purworejo lebih memperhatikan lagi mengenai pengelolaan sumber-sumber PAD. Yang paling mencolok untuk saat ini yang tertera didalam laporan APBD adalah mengenai tidak tercapainya target dari realisasi dari retribusi daerah, hal tersebut sewajarnya menjadi perhatian Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo. Untuk meningkatkan PAD pemerintah dituntut untuk mandiri dalam mengelola sumber pendapatan daerahnya misalnya dapat dilakukan dengan pengoptimalan sumber-sumber pertanian seperti durian dan manggis yang menjadi produk pertanian unggulan, kemudian tempat wisata guna menaikkan retribusi daerah, pelatihan sumber daya manusia sehingga dapat meningkatkan lapangan usaha dan macam-macam kreativitas ekonomi, dan penyuluhan mengenai pajak sehingga dapat meningkatkan pendapatan pajak daerah yang nantinya juga berdampak pada peningkatan PAD.

C. Rasio Efektivitas

Tabel 4.3. Hasil penilaian tingkat efektivitas

| Tahun | Pendapatan transfer | Target Penerimaan PAD | Rasio Efektivitas | kriteria |
|------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| 2014 | 200.258.601.329 | 135.087.316.992 | 148.24% | Sangat efektif |
| 2015 | 233.934.134.286 | 180.291.764.224 | 129.75% | Sangat efektif |
| 2016 | 255.299.240.424 | 267.294.605.312 | 95.62% | Efektif |
| 2017 | 298.606.494.653 | 237.664.092.160 | 125.64% | Sangat efektif |
| Rata-rata | | | 124.82% | Sangat efektif |

Dari tabel 4.3 didapat nilai yang cukup baik yang menggambarkan Kabupaten Purworejo dalam melakukan pemungutan pajak dan retribusi daerah yang merupakan sumber PAD telah berhasil dan sesuai dengan yang telah direncanakan. Secara keseluruhan tingkat efektifitas Kabupaten Purworejo dalam proses perencanaan dan realisasi penerimaan PAD dapat dikatakan sangat efektif dengan didapat nilai rata-rata terkait antara tahun anggaran 2014 sampai dengan 2017 sebesar 124,82% dan sebagian besar dari tahun terkait mencapai lebih dari 100% anggaran yang direncanakan. namun pada tahun 2016 target realisasi penerimaan PAD hanya mencapai 95,62% , sehingga diharap pemerintah memperhatikan hal tersebut dan diharapkan juga pemerintah mempertahankan dan meningkatkan pencapaian baik yang telah dicapai pada tahun sebelum dan sesudahnya.

D. Keserasian belanja

Tabel 4.4. Hasil penilaian belanja tidak langsung

| Tahun | Total Belanja Tidak langsung | Total Belanja Daerah | Persentase Belanja Tidak Langsung |
|------------------|-------------------------------------|-----------------------------|--|
| 2014 | 1.060.915.651.270 | 1.445.588.965.548 | 73.39% |
| 2015 | 1.254.789.167.785 | 1.783.917.689.792 | 70.34% |
| 2016 | 1.384.536.736.573 | 1.968.159.503.754 | 70.35% |
| 2017 | 1.445.809.724.673 | 2.265.141.731.647 | 63.83% |
| Rata-rata | | | 69.48% |

Tabel 4.5. Hasil penilaian belanja langsung

| Tahun | Total Belanja Langsung | Total Belanja Daerah | Persentase Belanja Langsung |
|------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|
| 2014 | 384.673.314.278 | 1.445.588.965.548 | 26.61% |
| 2015 | 529.128.522.007 | 1.783.917.689.792 | 29.66% |
| 2016 | 583.622.767.181 | 1.968159.503.754 | 29.65% |
| 2017 | 819.332.006.974 | 2.265.141.731.647 | 26.17% |
| Rata-rata | | | 30.52% |

Dari tabel 4.4 dan 4.5 terlihat bahwa Kabupaten Purworejo dalam membiayai kegiatan masih berfokus pada pembiayaan tidak langsung. Atau komitmen melakukan pembangunan masih kurang. Hal ini ditunjukkan dengan nilai dari pembiayaan yang tidak berkaitan langsung dengan program yang berkaitan dengan masyarakat dan program pemerintah masih tergolong tinggi yaitu berkisar antara 63,83% hingga 73,39% atau rata-rata 69,48% dari total belanja, yang terjadi diantara tahun 2014 hingga 2017, jika dibandingkan dengan belanja langsung atau belanja yang terkait dengan program pemerintah yang berkisar antara yang masih berkisar antara 26,61% hingga 36,17% atau rata-rata 30,52% dari total belanja.

E. *Share dan Growth*

1) Share

Tabel 4.6. Hasil penilaian share PAD nasional

| Tahun | PAD Nasional | Total Belanja Daerah Nasional | Persentase Share |
|--------------|---------------------|--------------------------------------|-------------------------|
| 2014 | 200.504.643.215.338 | 447.295.520.378.091 | 44.83% |

| Tahun | PAD Nasional | Total Belanja Daerah Nasional | Persentase Share |
|------------------|---------------------|--------------------------------------|-------------------------|
| 2015 | 215.376.545.577.687 | 915.518.210.355.374 | 23.53% |
| 2016 | 228.336.614.269.455 | 993.666.537.389.127 | 22.98% |
| 2017 | 273.398.630.336.144 | 1.054.303.521.596.150 | 25.93% |
| Rata-rata | | | 29.32% |

Tabel 4.7. Hasil penilaian share PAD Kabupaten Purworejo

| Tahun | PAD | Total Belanja Daerah | Persentase Share |
|------------------|-----------------|-----------------------------|-------------------------|
| 2014 | 200.258.601.329 | 1.445.588.965.548 | 13.85% |
| 2015 | 233.934.134.286 | 1.783.917.689.792 | 13.11% |
| 2016 | 255.299.240.424 | 1.968.159.503.754 | 12.99% |
| 2017 | 298.606.494.653 | 2.265.141.731.647 | 13.18% |
| Rata-rata | | | 13.28% |

Dilihat dari tabel 4.6 dan 4.7 bahwa share dari PAD terhadap belanja daerah mulai tahun 2014 sampai dengan 2017 adalah rata-rata 13,28% yang artinya bahwa persebaran dari PAD terhadap belanja daerah rendah. Dikatakan rendah karena share/persebaran daerah kabupaten purworejo berada dibawah dari nilai rata-rata share nasional yaitu 29,32%, atau - 13,28% dibawah dari share kabupaten nasional. Naik dan turunnya nilai tidak terlalu besar sehingga tidak merubah status dari persebaran PADnya. Didapatkan rata-rata nilai dari share dari tahun anggaran 2014 sampai 2017 adalah 13,28% bisa dibilang rendah. Sehingga dalam proses pembiayaan keseluruhan belanja daerah baik itu belanja langsung dan belanja tidak langsung,

PAD kabupaten Purworejo hanya mampu membiayai sebesar rata-rata 13,28% dan sisanya didanai dari dana pinjaman, dana bantuan, dan dana transfer dari pemerintah pusat/propinsi.

2) Growth

Tabel 4.8. Hasil penilaian growth nasional

| Tahun | PAD Nasional | Persentase Growth |
|------------------|---------------------|--------------------------|
| 2013 | 157.643.643.146.822 | 0 |
| 2014 | 200.504.643.215.338 | 21.38% |
| 2015 | 215.376.545.577.687 | 6.91% |
| 2016 | 228.336.614.269.455 | 5.68% |
| 2017 | 273.398.630.336.144 | 16.48% |
| Rata-rata | | 12.61% |

Tabel 4.9. Hasil penilaian growth Kabupaten Purworejo

| Tahun | PAD | Persentase Growth |
|--|-----------------|--------------------------|
| 2013 | 127.565.801.410 | 0 |
| 2014 | 200.258.601.329 | 36.30% |
| 2015 | 233.934.134.286 | 14.40% |
| 2016 | 255.299.240.424 | 8.48% |
| 2017 | 298.606.494.653 | 14.40% |
| Rata-rata Growth PAD Kab. Purworejo | | 18.39% |

Dilihat dari tabel 4.8 dan 4.9 didapat nilai dari pertumbuhan PAD kabupaten Purworejo dari tahun anggaran 2014 hingga 2017 berkisar antara 8,48% hingga 36,30% dapat

dikatakan bahwa hanya pada tahun 2014 pertumbuhan PAD dapat dikatakan bagus yaitu sebesar 36.30% dan disisa tahun terakhir (2015-2017) bisa dibbilang kurang baik karena mengalami penurunan. Namun secara rata-rata pertumbuhan PAD Kabupaten Purworejo dari Tahun anggaran 2014 hingga 2015 adalah senilai 18,39% , nilai tersebut memasukkanya kedalam kriteria pertumbuhan PAD yang tinggi, dikarenakan untuk rata-rata pertumbuhan PAD di tingkat kabupaten secara nasional sebesar 12,61%.

| | | |
|---|---|--|
| Rata-Rata Share (%) & Growth (%) | Kuadran II Share: Rendah Growth: Tinggi | Kuadran I Share: Tinggi Growth: Tinggi |
| | Kuadran IV Share: Rendah Growth: Rendah | Kuadran III Share: Tinggi Growth: Rendah |
| Sumber: Deddyk (Bappenas 2003) | | |

Metode kuadran terkait analisis yang digunakan sebagai penjabar mengenai status yang menggambarkan perekonomian Kabupaten Purworejo dapat ditentukan dengan nilai rata-rata antara nilai share dan growthnya. Dari data diatas didapatkan bahwa nilai dari share adalah 13,28% dan growthnya senilai 18,39%. Share rendah dan growth tinggi yang artinya posisi kemampuan perekonomian Kabupaten Purworejo berada pada kuadran II. Dapat dikatakan bahwa kabupaten purworejo dalam kondisi perekonomian belum ideal. Daerah mempunyai kemampuan untuk mengembangkan potensi lokal sehingga PAD berpeluang memiliki peran besar dalam APBD, oleh sebab itu pemerintah lebih dituntut untuk mengembangkan potensi lokal guna meningkatkan PAD.

5. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil perhitungan dan analisis yang telah dilakukan sebelumnya, hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Tingkat kemandirian Kabupaten Purworejo masih tergolong kurang mandiri.
2. Tingkat ketergantungan Kabupaten Purworejo masih sangat tinggi.
3. Tingkat rasio efektivitas menggambarkan tingkat efektivitas pengelolaan anggaran pemerintah Kabupaten Purworejo tergolong sangat efektif.
4. Tingkat rasio keserasian belanja menggambarkan bahwa komitmen pemerintah Kabupaten Purworejo untuk membangun daerahnya tergolong kurang.
5. Tingkat share dan growt dari PAD purworejo menempatkan daerah tersebut dalam kuadran II yang artinya kemampuan perekonomian di Kabupaten Purworejo belum ideal.

6. Keterbatasan

1. Keterbatasan waktu dan kesibukan dari peneliti dan Perangkat Pemerintah Daerah menghambat peneliti untuk mendapatkan data yang lebih lengkap dan mendalam.
2. Keterbatasan pemerintah Kabupaten Purworejo adalah kurang mampunya Pemerintah dalam menggali dan memaksimalkan pengelolaan kekayaan daerahnya.

3. Saran

1. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat bekerja sama dengan Perangkat Daerah yang terkait agar pengambilan data dapat dilakukan dengan efektif dan efisien sehingga data yang didapatkan lebih lengkap dan terperinci.
2. Untuk Pemerintah Kabupaten Purworejo diharapkan agar lebih dapat menggali potensi sumberdaya yang ada di Kabupaten Purworejo dan mengelolanya dengan baik sehingga diharapkan potensi daerah itu dapat membantu meningkatkan PAD agar dapat

berkontribusi lebih pada APBD sehingga Purworejo lebih mandiri dari segi perekonomiannya. Peningkatan PAD dapat dilakukan dengan pengelolaan yang baik terhadap pajak daerah, retribusi, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan lain-lain yang sah. Saat ini yang perlu mendapatkan perhatian lebih adalah terkait retribusi daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Angka Kemiskinan Hanya Turun 0,1%, Wabup Minta Percepatan. (2018). [online] didapatkan: <http://purworejokab.go.id/weblama/news/seputar-ekonomi/4264-angka-kemiskinan-hanya-turun-01-wabup-minta-percepatan> [28 November 2018].
- Badan Perencanaan Pengembangan Nasional (BAPPENAS). (2003). Peta Kemampuan Keuangan Provinsi Dalam Era Otonomi Daerah. Direktorat Pengembangan Otonomi Daerah. Kajian Bappenas. Hal 1-12.
- BUMD Dinilai Belum Berikan Kontribusi Yang Nyata. (2017). [online] Didapatkan: <http://purworejokab.Go.id/weblama/news/seputarpemerintahan/3889-bumd-dinilai-belum-berikan-kontribusi-yang-nyata> [28 November 2018].
- Mahmudi. (2007). Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah: Panduan Bagi Eksekutif, DPRD, dan Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan Ekonomi, Sosial, dan Politik. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Mardiasmo. (2002). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi Offset.
- PAD Rendah di Tengah Gerogotan Belanja Pegawai, APBD Tak Berpihak Pada Rakyat, 2017, [online] didapatkan: <https://purworejo.sorot.co/berita-6325-pad-rendah-di-tengah-gerogotan-belanja-pegawai-apbd-tak-berpihak-pada-rakyat.html> [3 Mei 2019].
- Pemerintah Indonesia. (2006). Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Jakarta, Indonesia.
- Pemerintah Indonesia. (2014). Undang-undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Jakarta, Indonesia.
- Persentase Penduduk Miskin di Jawa Tengah September 2016 mencapai 13,19 persen. (2018). [online] didapatkan: <https://purworejokab.bps.go.id/pressrelease/2017/01/03/63/persentase-penduduk-miskin-di-jawa-tengah-september-2016-mencapai-13-19-persen.html> [28 November 2018].
- Pilat, J. J., dan Moras, J. (2017) Analisis Rasio Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Manado Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Manado Tahun Anggaran 2011-2015. Jurnal Akuntansi. 6 (1). 45-46.
- Prastowo, D. (2011). Analisis Laporan Keuangan Konsep dan Aplikasi (Edisi 3). Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.